

# RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029

*“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat  
dan Cakupan Layanan Kesehatan Dasar”*



2025

Jalan R. Soerprapto Desa Sanggu  
<https://opd.baritoselatankab.go.id/dinkes/>



# **Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**  
Jl. Bandara Sanggu 73751 Buntok Kalimantan Tengah

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun. Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan dan bahan evaluasi program dan kegiatan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan selama jangka waktu tertentu.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ada kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Buntok, 2025

Pt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Barito Selatan



**dr. Dadang Baskoro Nugroho, SP.Pd**  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 99720209 200212 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....		i
DAFTAR ISI .....		ii
DAFTAR TABEL.....		iii
DAFTAR GAMBAR.....		iv
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Dasar Hukum .....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
	1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	8
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	38
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	43
	3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.....	43
	3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan .....	43
	3.3 Strategi Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	43
	3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	44
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN .....	56
	4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah .....	56
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan .....	102
BAB V	PENUTUP .....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1.1 Kekuatan SDM di Lingkungan Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (ASN).....	19
Tabel 2.1.2.1.1 Kekuatan SDM di Lingkungan Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Golongan (ASN).....	19
Tabel 2.1.2.2.1 Daftar sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 .....	20
Tabel 2.1.2.3.1 Total anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 dan tahun 2025 .....	20
Tabel 2.1.3.1.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2023 .....	22
Tabel 2.1.3.2.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024 .....	26
Tabel 2.13.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 .....	27
Tabel 2.2.2.1 Isu Strategis Dinas Kesehatan .....	41
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 .....	46
Tabel 3.2 Penahapan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 .....	49
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 .....	50
Tabel 4.1.1 Tabel 4.1.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029.....	57
Tabel 4.1.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030 .....	86
Tabel 4.1.3. Daftar Program Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	97
Tabel 4.2.1.1. Indikator Kinerja Utama Dinas kesehatan Tahun 2025-2030 .....	103
Tabel 4.2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Dinas kesehatan Tahun 2025-2030 .....	104
Tabel 4.2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas kesehatan Tahun 2025-2030 .....	105
Tabel 4.2.2.3. Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2030.....	105

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan .....	18
Gambar 2.1.2 Capaian Angka Harapan Hidup .....	28
Gambar 2.1.3 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2024 .....	29
Gambar 2.1.4 Capaian Jumlah Kematian Ibu .....	30
Gambar 2.1.5 Trend Jumlah Kematian Ibu tahun 2021-2024 .....	31
Gambar 2.1.6 Grafik Capaian Angka Kematian Bayi Tahun 2024 .....	33
Gambar 3.1.6 Capaian Prevalensi Balita Stunting Tahun 2024 .....	33
Gambar 3.1.7 Capaian Prevalensi Balita Stunting Tahun 2024 .....	34
Gambar 3.1.8 Grafik Trend Prevalensi Balita Stunting Tahun 2021-2024 .....	34

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Adapun tugas menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi tersebut dan pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengharuskan setiap instansi di daerah menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga diperlukan adanya dokumen perencanaan berupa Renstra Perangkat Daerah yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan serta mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memiliki tujuan dan fungsi untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah dan pembangunan daerah dalam jangka periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi

seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya dalam mewujudkan Tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini dibuat sebagai pedoman penting bagi Dinas Kesehatan untuk bisa mencapai tujuan, memberikan arahan yang jelas untuk jangka panjang, menjadi dasar pengambilan Keputusan, dan dapat menciptakan prioritas serta diharapkan nantinya dapat memperbaiki kinerja Dinas Kesehatan secara menyeluruh.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh aparatur Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan urusan kesehatan selama 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

2. Menjabarkan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah;
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan untuk mencapai target tujuan dan sasaran

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan UPT nya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, menjelaskan permasalahan pelayanan dan isu strategis bidang kesehatan.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

## PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

Memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan berserta kinerja, indikator, target, pagu indikatif, serta memuat program prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah urusan kesehatan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini bab ini berisi Kesimpulan pentng substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan bidang Kesehatan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten**

###### **Barito Selatan**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesehatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, mengadakan Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain guna pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.,

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d) pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- e) perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas;
- f) peningkatan nilai SAKIP Dinas Kesehatan;
- g) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- h) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala daerah terkait dengan urusan kesehatan; dan
- i) pelaksanaan Koordinasi tugas dengan Dinas dan Instansi terkait.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d) fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- e) penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f) koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan

- pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- g) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h) pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan;
- i) pengelolaan hubungan masyarakat;
- j) pengelolaan data dan sistem informasi;
- k) koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- m) pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Serkretariat membawahkan :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

### 3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- b) pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- c) pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d) pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

- e) pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- f) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- g) pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- h) fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- i) penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- j) penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- k) perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- m) pemberian bimbingan teknis pada UPT Dinas Kesehatan;
- n) pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

Tugas pokok Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b) pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
- c) pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d) advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian

- penyakit;
- e) pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
  - f) pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
  - g) koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - h) pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - i) pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
  - j) pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;
  - k) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - l) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan;
  - m) pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - n) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### 5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.

Tugas Pokok Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- b) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- c) pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- d) pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
- e) fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f) pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- g) pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- h) pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- i) pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- j) pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- k) pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- l) peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- m) pengelolaan pendanaan kesehatan;
- n) perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- o) peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- p) pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- q) pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;

- r) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- s) pemberian bimbingan teknis pada UPT Dinas Kesehatan;
- t) pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; dan
- u) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan terdiri dari :

##### 1) UPT RSUD Jaraga Sasameh

UPT RSUD Jaraga Sasameh mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. UPT RSUD Jaraga Sasameh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan UPT
- b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan, pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

##### 2) UPT Puskesmas

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. UPT Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya
- b) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya
- c) Perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan
- d) Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan
- e) Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan

- f) Penggerakan Masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama pimpinan wilayah dan sector lain terkait
- g) Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
- h) Pelaksanaan pencatatan, pelaporan capaian dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan

UPT Puskesmas berjumlah 12 (dua belas) yakni :

- 1) UPT Puskesmas Jenamas
  - 2) UPT Puskesmas Mengkatip
  - 3) UPT Puskesmas Bangkuang
  - 4) UPT Puskesmas Babai
  - 5) UPT Puskesmas Baru
  - 6) UPT Puskesmas Buntok
  - 7) UPT Puskesmas Kalahien
  - 8) UPT Puskesmas Sababilah
  - 9) UPT Puskesmas Pendang
  - 10) UPT Puskesmas Bantai Bambure
  - 11) UPT Puskesmas Patas I
  - 12) UPT Puskesmas Tabak Kanilan
- 3) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

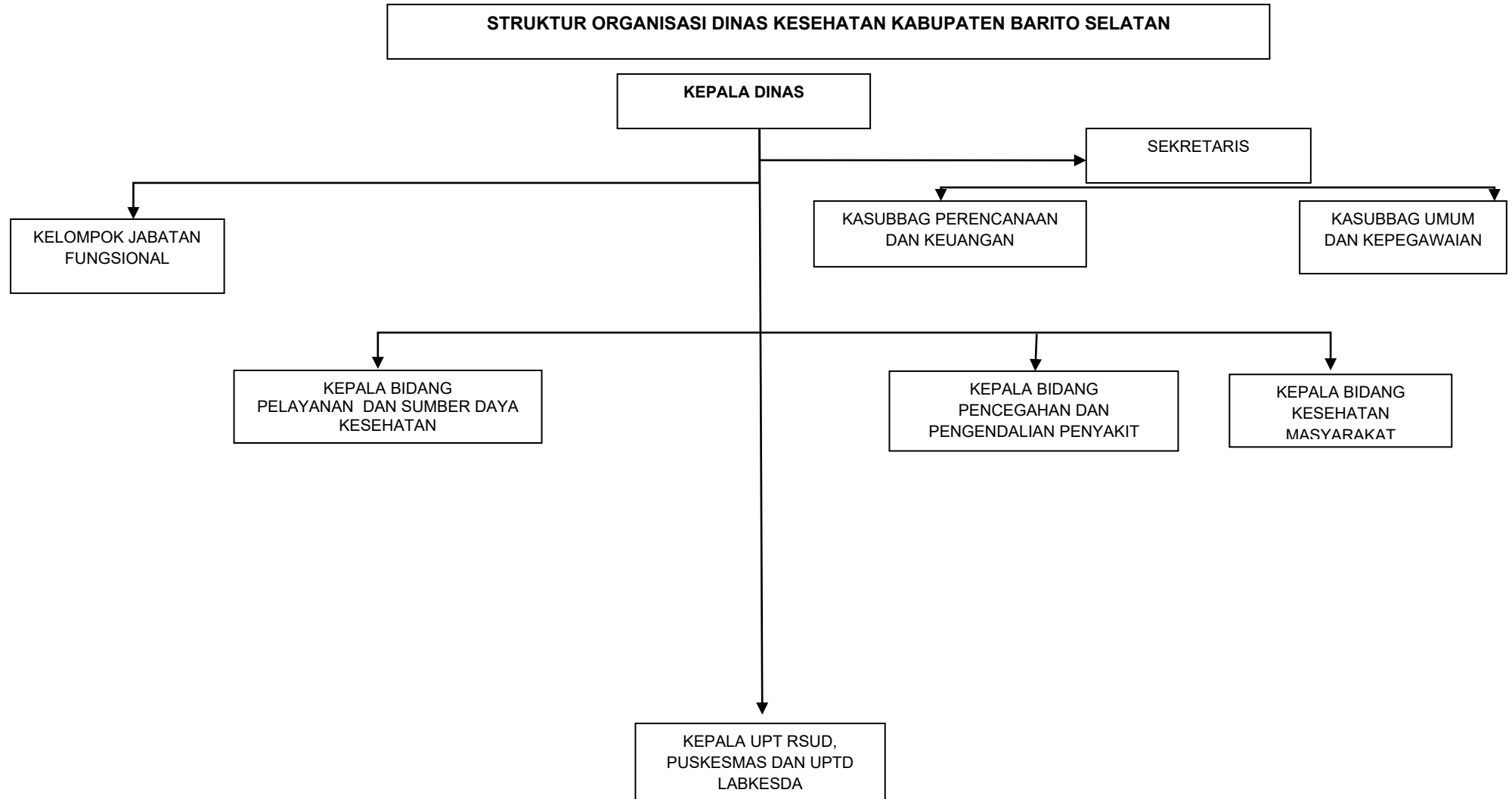
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan laboratorium klinik,
- b) Penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat
- c) Pengendalian pemeriksaan kegiatan pemeriksaan mikrobiologi, fisika, kimia, patologi dan imunologi
- d) Pelayanan rujukan laboratorium dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan

- e) Penyelenggaraan kordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas
- f) Menyelenggarakan kepegawaian dan sumber daya manusia, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
- g) Penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

### 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



## 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas, RSUD dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Tahun 2025 berjumlah 1270 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2.1.1**  
**Kekuatan SDM di Lingkungan Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (ASN)**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	34
2	Sarjana S-1	402
3	Sarjana Muda (DIII) / (D/IV)	716
4	SLTA sederajat	118
5	SLTP	-
6	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>1270</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

**Tabel 2.1.2.1.2**  
**Kekuatan SDM di Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Golongan (ASN)**

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	44
2	Golongan III	883
3	Golongan II	343
4	Golongan I	0
<b>Jumlah</b>		<b>1270</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

### 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.2.2.1**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Barito Tahun 2025**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Rumah Sakit Pemerintah	1
2	Puskesmas Non Perawatan	7
3	Puskesmas Perawatan	5
4	Puskesmas Pembantu	57
5	Poskesdes + Polindes	77
6	Klinik/ Balai Pengobatan	4
7	Apotik	12
8	Toko Obat	9
9	Posyandu	173
7	Puskesmas Keliling	12

*Sumber : Data Aset, Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan*

### 2.1.2.3 Anggaran Dinas Kesehatan

#### a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tahun 2025 terlihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.2.3.1**  
**Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten**  
**Barito Selatan Tahun 2024 dan 2025**

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2025
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
1. Retribusi Daerah	314.611.750	114.884.500	314.611.750
2. Lain-lain PAD yang	38.254.168.046	35.466.702.502	35.798.493.785
<b>2. LAIN-LAIN PENDAPATAN</b>			
1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	10.343.090.781	4.579.879.303	9.507.399.859
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>48.911.870.577</b>	<b>40.161.466.305</b>	<b>58.832.831.394</b>

<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>			
1. Belanja Pegawai	89.955.348.800,54	82.065.010.146	96.377.931.939,80
2. Belanja Barang dan Jasa	110.541.245.989,46	96.969.471.663,50	100.904.367.288,20
3. Belanja Hibah	120.000.000	120.000.000	0
<b>BELANJA MODAL</b>			
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.397.701.733	14.169.028.934	7.068.836.400
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.379.000.000	15.287.842.544	14.130.750.000
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.396.287.500	2.368.000.000	1.240.250.000
4. Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	2.500.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>237.789.584.023</b>	<b>210.979.353.287,50</b>	<b>222.222.135.628</b>

Sumber : Data SIPD Penatausahaan, Sub Bag Perencanaan dan Keuangan

### 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito

#### Selatan

Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang pada suatu bangsa.

Dalam mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indikator yaitu capaian indikator kinerja Pembangunan daerah urusan Kesehatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator impact dan capaian Indikator Kinerja Kunci yaitu capaian indikator outcome (SPM) dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

### 2.1.3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2024

Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3.1.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	76,00	85,85	96,57	66,01	58,53
2	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	83,3	75	90	75	8,33
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	69,82	63,94	65,69	51,01	45,18
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah	%	64,91	72,85	88,43	69,22	64,63
6	Cakupan kunjungan bayi	%	62,13	66,37	90,05	95,36	79,68
7	Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup	0	3,89	2	4	1
8	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	251	399,29	273	132	71
9	Angka kesakitan DBD	Orang	7	2	4	91	70
10	Jumlah penderita	Orang	0	2	0	0	0

	penyakit menular (Malaria)						
11	Jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi)	Orang	9.312	8.048	7.484	9.599	10.474
12	Angka Penemuan Kasus TBC	%	94	183	262	138	87
13	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	%	98	94	97	82	98
14	Jumlah kasus baru AIDS	Orang	2	1	9	12	11

Dari Tabel diatas dapat kita dijelaskan bahwa Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan memiliki peran penting. Hal ini dikarenakan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih dapat meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Namun, capaian kinerja ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada periode tahun tahun 2022– 2024. Pada tahun 2022, cakupan pertolongan persalinan sudah mencapai 96,57 persen namun terus menurun hingga mencapai 58,53 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas layanan persalinan yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya bidan dan tenaga perawat pendukung.

Permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Barito Selatan masih memerlukan perhatian. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan dari 69,82 persen pada tahun 2020 menjadi 45,18 persen pada tahun 2024, sedangkan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2024 hanya mencapai 64,63 persen, masih di bawah target pelayanan gizi ibu hamil secara ideal. Di sisi lain, aspek mortalitas

menunjukkan perbaikan, yaitu angka kematian ibu (AKI) menunjukkan tren positif dari 399,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, dan menurun menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) tercatat menurun dari 3,89 pada tahun 2021 menjadi 1,00 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya kemajuan pada aspek penanganan kasus risiko tinggi, namun cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar—terutama pemantauan kehamilan, pemenuhan gizi, dan intervensi tumbuh kembang—masih perlu diperkuat. Kekurangan intervensi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya prevalensi stunting di Barito Selatan, khususnya pada masa 1.000 hari pertama kehidupan.

Pada tahun 2024, angka kesakitan Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, yaitu mencapai 70 orang. Begitu pula terlihat pada jumlah penderita penyakit hipertensi yang mengalami kecenderungan meningkat, yaitu mencapai 10.474 orang. Sementara itu, angka penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 87 orang pada tahun 2024. Meskipun data belum cukup untuk menyimpulkan pergeseran beban penyakit, temuan ini menjadi sinyal penting bagi penguatan kewaspadaan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, kondisi geografis Barito Selatan yang memiliki *oxbow lake*, potensi genangan air sebagai tempat berkembang biak seperti nyamuk DBD perlu diantisipasi secara serius. Upaya pengendalian penyakit perlu mempertimbangkan faktor lingkungan lokal dan memperkuat pendekatan promotif serta preventif berbasis risiko.

Rasio dokter per 100.000 digunakan untuk menilai ketersediaan layanan kesehatan dan dapat mencerminkan aksesibilitas masyarakat terhadap perawatan medis. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan walaupun masih berada di bawah standar ideal, yakni 100 dokter per 100.000 penduduk berdasarkan standar World Health Organization (WHO). Pada tahun 2023, Rasio Dokter per 100.000 Penduduk di Kabupaten Barito Selatan sebesar 46,03 yang berarti tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 46 dokter. Sementara itu, Rasio Dokter Gigi per 75.000 Penduduk mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 4,43. Namun, masih jauh dari rasio ideal yang ditetapkan oleh WHO, yakni 10 per 75.000 penduduk. Hal ini mengartikan bahwa sebanyak 75.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan hanya dilayani oleh 4 dokter gigi. Beban kerja dokter yang berlebihan karena rasio yang kurang ideal menjadi akar masalah yang mengkhawatirkan. Jumlah dokter yang sedikit menunjukkan rendahnya kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

#### **2.1.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024**

Standar Melayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui UPT Kesehatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan dan merupakan indikator kinerja kunci urusan kesehatan. Berikut Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel Berikut :

Tabel 2.1.3.2.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024

No	Indikator SPM	Target (%)	Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	79,65	70,42	85,6	97,87
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	85,85	73,32	78,7	88,51
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	78,12	40,05	80,1	98,57
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	41,05	59,77	98,18	62,72
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	39,82	82,44	87,37	96,33
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	90	50,4	75,34	97,37
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	86,67	50,48	95,54	80,7
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	86,67	52,79	50,97	79,16
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	100	86,67	77,56	67,47	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100	80	91,67	94,29	95,56
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	26,49	91,58	79,21	91,23
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	43,52	38,9	81,56	98,12

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan meskipun di akhir tahun 2024 ada 4 (empat) indikator pelayanan yang masih dibawah 90 % yaitu pelayanan pada ibu bersalin, pelayanan Kesehatan balita, pelayanan Kesehatan pada usia lanjut dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya capaian tersebut diantaranya ialah kurangnya kesadaran Masyarakat dalam hal ini ibu hamil/ orang tua / wali yang tidak berkunjung ke posyandu untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara berkala sehingga capaian belum bisa mencapai sesuai target. Dan untuk capaian

penderita hipertensi dan pelayanan usia lanjut masih dibawah 90 % disebabkan salah satunya ialah masih kurangnya kesadaran dan juga ketidakmampuan Masyarakat yang masyoritas penderita hipertensi adalah usia diatas 60 tahun untuk berkunjung ke posyandu lansia yang mana pelayanan Kesehatan bagi lansia secara berkala dilakukan setiap bulan sehingga tidak semua target terpenuhi.

### 2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 memuat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut adalah realisasi capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 :

Tabel 2.13.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Capaian Kinerja	Sumber data
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,39 tahun	67,86 tahun	100,69 %	BPS
Jumlah Kematian Ibu	Orang	≤ 4 orang	1 orang	400 %	Tabel Profil Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	Per 1000 Kelahiran Hidup	≤ 5,5 Per 1000 Kelahiran Hidup	11,9 Per 1000 Kelahiran Hidup	46,21 %	Tabel Profil Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
Prevalensi Balita Stunting (Survei Nasional)	%	≤ 16,51 %	33,3 %	49,58 %	Data SSGI 2024
Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kriteria : A, BB, B, CC, C, D	BB	BB	100 %	Hasil Penilaian LAKIP Oleh Apip tahun 2024 Belum rilis

Berdasarkan tabel tersebut bahwa dari 5 (lima) indikator ada 3 yang sudah memenuhi target pada tahun 2024 yaitu Angka Harapan Hidup, Jumlah Kematian Ibu, dan Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah. Sedangkan masih

belum mencapai target ada 2 (dua) indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 dan Prevalensi Balita Stunting.

Evaluasi dan analisis capaian indikator Kinerja Utama (IKU) dijelaskan sebagai berikut :

### 2.1.3.3.A Angka Harapan Hidup

Angka harapan Hidup merupakan Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Cara Perhitungan indikator ialah Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Hasil perolehan didapatkan dari data yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Barito Selatan yang tertuang pada Buku Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2024.

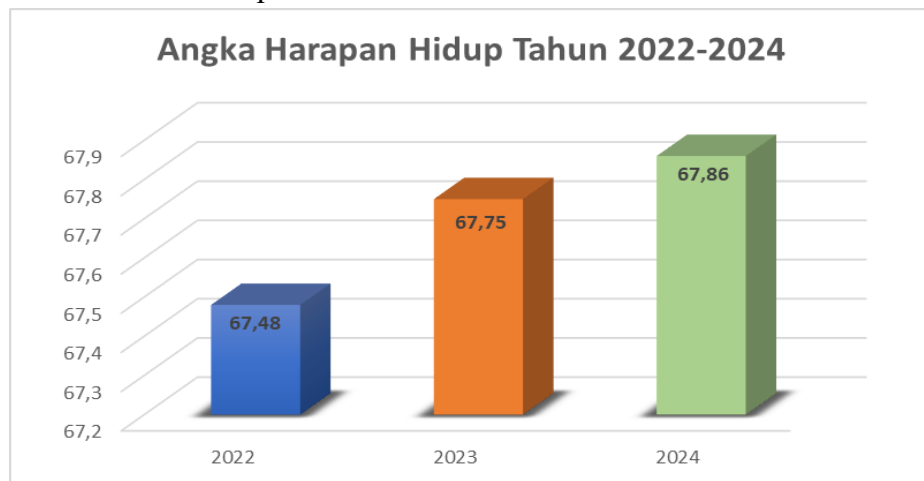
Gambar 2.1.2 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024



Berdasarkan gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 yaitu 67,86 Tahun sudah mencapai atau melebihi target kinerja tahun 2024 yaitu 67,39 tahun atau capaian kinerja sebesar 100,69%. Capaian ini apabila dibandingkan dengan

capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 70,72 tahun, maka capaian angka harapan hidup di Kabupaten Barito Selatan masih dibawah angka provinsi Kalimantan Tengah, dan jika dibandingkan dengan capaian angka harapan hidup secara nasional sebesar 73,93 tahun maka capaian angka harapan hidup di Kabupaten Barito Selatan masih dibawah angka Nasional.

Gambar 2.1.3 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2024



Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2024, BPS Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan gambar 2.1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Umur Harapan hidup Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pencapaian ini yaitu diantaranya faktor sosial, ekonomi, Kesehatan, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan trend capaian angka harapan hidup yang positif dan menunjukkan bahwa adanya peningkatan hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu dan anak.

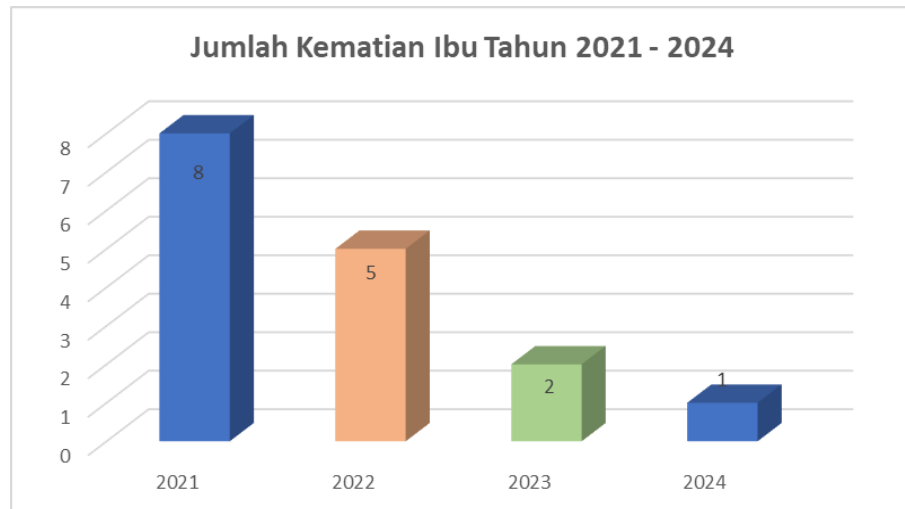
### 2.1.3.3.B Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu ialah Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Capaian Jumlah kematian jika semakin sedikit dari target maka capaian lebih baik (Indikator negative). Pada tahun 2024 jumlah kejadian kematian ibu ialah 1 (satu) orang atau capaian 400 % dari target yaitu 4 (empat) orang. Capaian jumlah kematian ibu tahun 2024 sudah mencapai target. Dibandingkan jumlah kematian ibu tahun 2023, pada tahun 2024 kasus kematian mengalami penurunan.

Gambar 2.1.4 Capaian Jumlah Kematian Ibu



Gambar 2.1.5 Trend Jumlah Kematian Ibu tahun 2021-2024



Berdasarkan gambar 2.1.5 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian jumlah kematian ibu di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan trend capaian jumlah kematian ibu yang positif dan menunjukkan bahwa adanya peningkatan hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu yang maksimal. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebesar 70,52 Per 100.000 Kelahiran Hidup, jika dibandingkan dengan Capaian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 179,3 Per 100.000 Kelahiran hidup yang berarti capaian di Kabupaten Barito Selatan lebih baik karena kasus jumlah kematian ibu lebih sedikit dibandingkan di Tingkat provinsi Kalimantan Tengah.

#### 2.1.3.3.C Angka Kematian Bayi

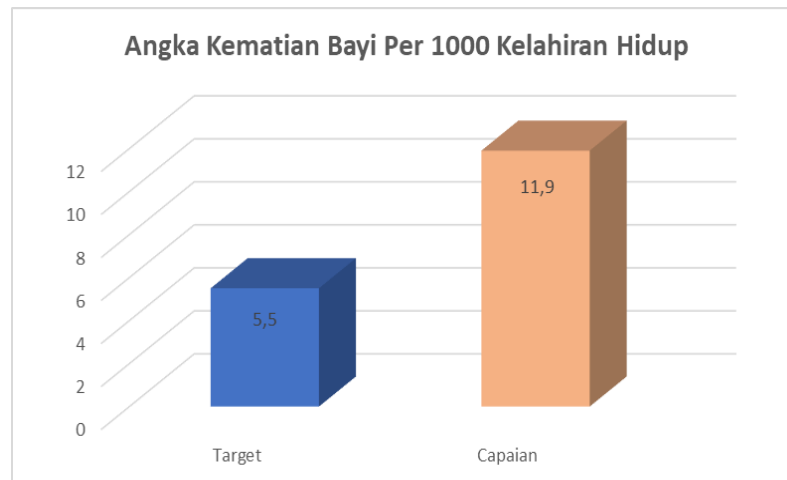
Angka Kematian bayi ialah kematian bayi usia 0-11 bulan di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu tertentu tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu yang sama.

Formula angka kematian bayi yakni Jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan di Kabupaten Barito Selatan dibagi jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu yang sama) dikali 1000.

Capaian Angka Kematian bayi pada tahun 2024 yaitu 11,9 Per 1000 kelahiran hidup (46,21 %), capaian ini belum memenuhi target yaitu capaian dibawah 5,5 per 1000 kelahiran hidup. Kasus kematian terjadi diakibatkan diantaranya yaitu BBLR dan premature (11 bayi), Asfiksia (2 Bayi) infeksi (2 bayi), kelainan kongenital (2 bayi), dan kelainan kongenital /Post neonatal (2 bayi).

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelayanan bayi baru lahir yang juga menjadi faktor resiko dalam mempengaruhi capaian angka kematian bayi yakni diantaranya ialah kondisi fasilitas Kesehatan di desa seperti puskesmas pembantu yang dari segi bangunan dan ketersediaan prasarana serta alat Kesehatan dan bahan medis yang kurang sehingga hal ini mengganggu optimalnya pelayanan Kesehatan di tingkat desa. Capaian Kinerja angka kematian bayi Kabupaten Barito Selatan bila dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 12,69 Per 1000 kelahiran hidup lebih rendah artinya kasus kematian bayi di Kabupaten Barito Selatan lebih rendah dari kasus kematian di Tingkat provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2.1.6 Grafik Capaian Angka Kematian Bayi Tahun 2024

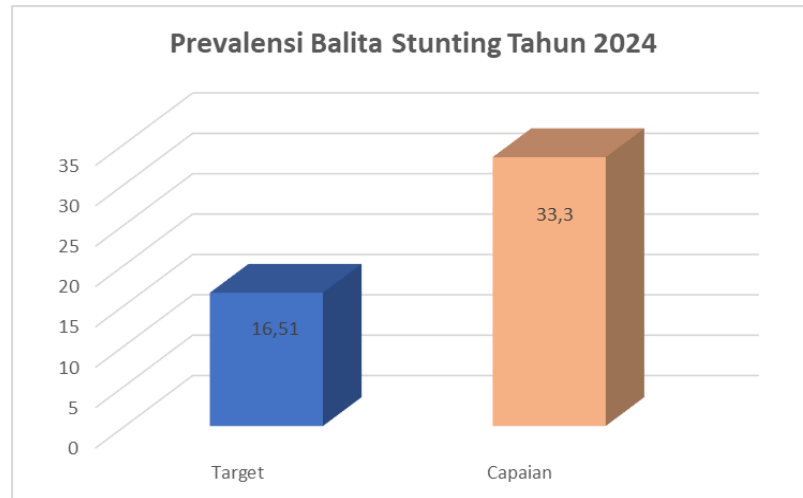


#### 2.1.3.3.D Prevalensi Balita Stunting

Capaian Prevalensi Balita Stunting ialah Persentase balita usia 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-Score kurang dari -2 Standar Deviasi. Formulasi Prevalensi Balita Stunting yakni Jumlah balita dengan(tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD di Kabupaten Barito Selatan dibagi jumlah balita yang diukur di Kabupaten Barito Selatan) dikali 100.

Capaian prevalensi stunting tahun 2024 berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2024 dapat dilihat dari grafik berikut :

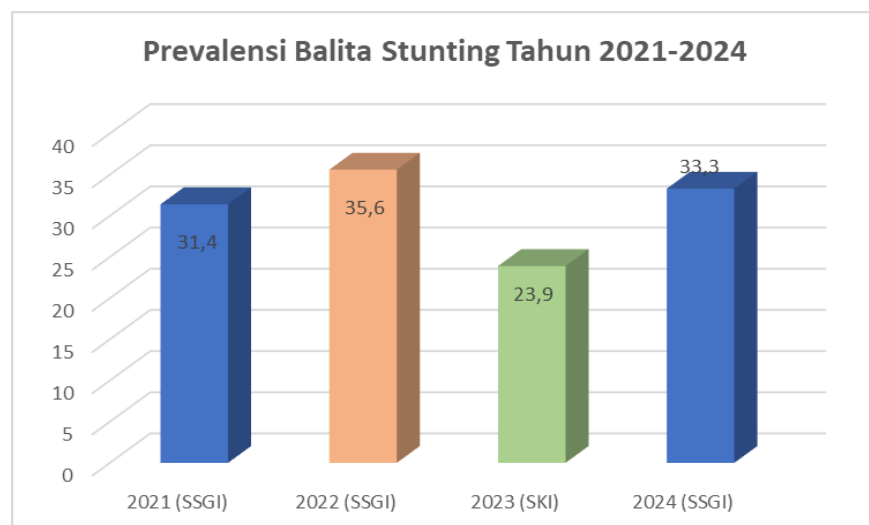
Gambar 2.1.7 Capaian Prevalensi Balita Stunting Tahun 2024



Berdasarkan gambar 2.1.7 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2024 belum mencapai target, dengan capaian 33,3 % dari target sebesar 16,51 %. Capaian ini berdasarkan data SSGI tahun 2024.

Berikut data Prevalensi Stunting 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 3.1.8 Grafik Trend Prevalensi Balita Stuting Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik 2.7 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Barito Selatan di tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan berdasarkan 2 (dua) metode survei yakni ditahun 2023 adalah survei Kesehatan Indonesia dan ditahun 2024 adalah survei Status Gizi Indonesia.

#### **2.1.3.3.E Nilai Sakip Dinas Kesehatan**

Nilai Sakip Dinas Kesehatan ialah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan (Sakip) yang dilakukan Evaluasi dan Penilaian oleh APIP Daerah pada kurun waktu yang sama. Nilai sakip dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 berdasarkan evaluasi dan penilaian oleh APIP adalah Kategori B, maka hasil capaian belum memenuhi target yaitu BB.

#### **Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Umum terdiri dari : Individu, kelompok, atau komunitas yang menjadi penerima manfaat langsung dari layanan kesehatan, yang mencakup:
  - ✓ Sasaran primer: Kelompok yang perilaku kesehatannya perlu diubah, misalnya untuk mulai menggunakan fasilitas kesehatan atau menerapkan gaya hidup sehat.
  - ✓ Kelompok rentan: Bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang memiliki kebutuhan kesehatan spesifik.
  - ✓ Masyarakat yang memiliki masalah kesehatan: Mereka yang mengalami masalah kesehatan karena ketidaktahuan, ketidakmauan, atau ketidakmampuan dalam mengatasi masalah tersebut.

2. Pemerintah : Pemerintah di tingkat lokal dan nasional menjadi sasaran untuk memastikan kebijakan dan program kesehatan berjalan efektif, seperti melalui peraturan menteri kesehatan atau strategi dinas kesehatan.
3. Sektor Swasta: Pelaku bisnis dan industri juga dapat menjadi sasaran untuk terlibat dalam pengembangan layanan dan program kesehatan.
4. Tokoh Masyarakat/Organisasi: Tokoh masyarakat, kepala keluarga, dan pemimpin komunitas menjadi sasaran untuk membantu mengedukasi dan menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat luas.
5. Institusi Pelayanan Kesehatan: Fasilitas seperti Puskesmas, rumah sakit, dan klinik menjadi bagian dari ekosistem layanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

#### **2.1.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Layanan**

Mitra Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan mencakup beberapa pihak yakni pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri melalui kader kesehatan. Dinas Kesehatan berperan sebagai inisiator, fasilitator, dan penggerak dalam kemitraan, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program-program seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan.

##### **Jenis-jenis Mitra Dinas Kesehatan**

1. Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perangkat Daerah lain:

Dinas Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan kesehatan dan mitra dengan beberapa perangkat daerah lain dalam hal kerjasama/ kolaborasi dalam upaya

pengentasan kemiskinan yaitu seperti Dinas Sosial dalam pemenuhan ketersediaan data masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu dalam data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah Daerah. Bapperida dan BP3AKB dalam kerjasama upaya pencegahan dan pengendalian dan penanganan balita stunting, Dinas Sosial kerjasama terkait penanganan orang dengan gangguan jiwa dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan.

## 2. Pelaku Usaha:

Terlibat dalam kemitraan untuk mendukung program kesehatan, seperti program Satu Sehat.

## 3. Organisasi Masyarakat (Ormas):

Berperan sebagai mitra dalam penanganan kesehatan, contohnya melalui program-program yang sudah ada.

## 4. Masyarakat:

Melalui peran kader kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat yang memberikan edukasi dan bantuan pertolongan pertama.

## 5. Unit Pelayanan Kesehatan:

Seperti Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), yang memberikan berbagai layanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.

## 6. Peran Dinas Kesehatan dalam Kemitraan :

- ✓ Inisiator: Memprakarsai kemitraan untuk menanggulangi masalah kesehatan.
- ✓ Motor/Dinamisator: Sebagai penggerak kemitraan melalui kegiatan dan

pertemuan bersama.

- ✓ Fasilitator: Memberikan kemudahan agar kegiatan kemitraan berjalan lancar.
- ✓ Pemasok Input Teknis: Memberikan masukan teknis mengenai program kesehatan.
- ✓ Dukungan Sumber Daya: Memberikan dukungan sumber daya sesuai potensi yang ada.

#### 7. Manfaat Kemitraan

- ✓ Sinergi dan Pencapaian Tujuan: Penggalangan dan penghubungan sumber daya antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.
- ✓ Pemerataan Kesehatan: Terwujudnya pemerataan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
- ✓ Peningkatan Kualitas Hidup: Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

### 2.2.1 Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di lingkup Dinas Kesehatan ialah sebagai berikut :

#### 1) Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Rata-rata nilai UHH di Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah karena masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Hal ini disebabkan

oleh minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya akses dan kualitas sarana prasarana yang belum mumpuni.

## 2) Tingginya Risiko Kematian Ibu Saat Melahirkan

Tingginya risiko kematian ibu menjadi salah satu faktor yang turut menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Kabupaten Barito Selatan masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh tingginya angka pernikahan usia dini yang meningkatkan jumlah kehamilan pada usia di bawah 20 tahun. Kelompok usia ini rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang turut memperburuk akses layanan maternal. Hal ini berdampak pada menurunnya cakupan pelayanan yang tercermin dari penurunan tren cakupan kunjungan ibu dan pemberian tablet tambah darah.

## 3) Rendahnya Cakupan dan Kualitas Pemenuhan Gizi Balita

Permasalahan stunting masih menjadi catatan bagi Kabupaten Barito Selatan. Kasus stunting menunjukkan tren yang cenderung meningkat, seperti pada Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Dusun Utara. Lonjakan kasus dalam empat tahun terakhir mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan belum berjalan optimal. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan keluarga akan pentingnya pemberian asupan gizi dalam kehamilan dan kesadaran untuk memeriksa rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, peran dan fungsi Posyandu sebagai layanan kesehatan dasar belum optimal baik dari segi kapasitas kader, ketersediaan

alat ukur maupun integrasi layanannya dengan fasilitas kesehatan.

#### 4) Lemahnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Barito Selatan belum menunjukkan efektivitas yang konsisten yang ditandai dengan fluktuasi kasus dan lemahnya intervensi berbasis data. Lonjakan kasus DBD dan peningkatan penderita hipertensi mencerminkan lemahnya sistem deteksi dini dan promosi kesehatan. Penemuan dan keberhasilan pengobatan TBC juga menunjukkan tren penurunan yang menandakan belum optimalnya upaya penanganan secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan kasus AIDS dari tahun ke tahun mengindikasikan minimnya edukasi dan layanan kesehatan preventif. Adapun permasalahan yang menyebabkan kondisi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

#### 5) Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Masyarakat di kabupaten barito Selatan tidak lepas dari ketersediaan data kepesertaan itu sendiri yang mana jumlah kepesertaan setiap bulan nya bisa bertambah maupun berkurang berdasarkan beberapa kondisi yang perlu dilakukan penguatan data kepesertaan jaminan Kesehatan.

### 2.2.2 Isu Strategis

Adapun isu strategis Kabupaten Barito Selatan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Percepatan Pemerataan Akses Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas merupakan langkah krusial dalam memantapkan fondasi pembangunan daerah. Upaya ini menekankan pentingnya layanan kesehatan dasar yang merata,

tenaga medis yang terdistribusi secara adil, serta perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan sistem kesehatan diperlukan untuk menjawab tantangan tingginya kebutuhan layanan maternal dan anak, peningkatan status gizi, serta pengendalian penyakit secara terpadu. Dengan sistem layanan yang inklusif dan adaptif, daerah dapat membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan lebih siap menghadapi dinamika pembangunan ke depan.

Adapun Isu Strategis Secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.2.1 Isu Strategis Dinas Kesehatan**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Kesehatan			Isu Stragis Dinas Kesehatan
		Global	Nasional	Regional	
<p>Potensi daerah di bawah kewenangan Dinas Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan kebijakan dan melaksanakan program-program kesehatan masyarakat.</li> <li>- Mengelola pelayanan kesehatan bagi penduduk pada berbagai kondisi, termasuk usia produktif dan lansia.</li> <li>- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengendalian penyakit menular</li> </ul>	<p>Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya Risiko Kematian Ibu Saat Melahirkan</li> <li>- Rendahnya Cakupan dan Kualitas Pemenuhan Gizi Balita</li> <li>- Lemahnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular</li> <li>- Rendahnya / kurangnya Cakupan Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan</li> </ul>	<p>SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</p>	<p>Rendahnya kualitas sumber daya manusia</p>	<p>SDM yang berdaya saing</p>	<p>Percepatan Pemerataan Akses Fasilitas dan Tenaga Kesehatan</p>

<p>dan tidak menular.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan surveilans epidemiologi, imunisasi, dan penyehatan lingkungan</li> <li>- Mengelola pelayanan kesehatan pada saat kejadian luar biasa, bencana, atau potensi bencana</li> <li>- Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan primer dan rujukan</li> <li>- Mengelola perizinan di bidang kesehatan</li> <li>- Mengawasi sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman.</li> <li>- Mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia (SDM) kesehatan.</li> <li>- Melaksanakan kebijakan terkait pembiayaan dan jaminan kesehatan.</li> <li>- Melaksanakan Administrasi dan Fungsi Lainnya</li> </ul>					
---	--	--	--	--	--

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan**

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan ialah mendukung misi nomor 1 (satu) pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil”. Adapun tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ialah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.

### **3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan**

Adapun sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ialah ada 5 (lima) yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat
2. Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan
3. Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
4. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan
6. Meningkatnya nilai maturitas SPIP Dinas Kesehatan
7. Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Kesehatan

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Adapun Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kapasitas Kesehatan

2. Optimalisasi pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat.

3. Memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif

### **3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi gratis serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis,
2. Percepatan perluasan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku hidup sehat.
3. Percepatan penanganan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular.
4. Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat prevalensi kategori tinggi.
5. Peningkatan edukasi kesehatan bagi ibu hamil yang terintegrasi dengan pendampingan pada masa pra dan pasca persalinan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.
6. Perluasan cakupan dan keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan layanan primer, peningkatan kunjungan kehamilan dan imunisasi, serta mobilisasi kader di tingkat desa.
7. Peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine.
8. Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis.

9. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kepesertaan BPJS secara gratis.
10. Penguatan pelayanan kesehatan melalui penataan tata kelola manajerial, penguatan regulasi internal, dan perbaikan standar operasional di seluruh jenjang fasilitas kesehatan.
11. Pemerataan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang proporsional serta fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan apotek yang mudah diakses.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.	1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kh	122	109	97	86	77	70	
			Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kh	9,2	7,2	5,6	4,2	3,5	2,1	
			Prevalensi Stunting	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14	
			Cakupan kesepertaan Jaminan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	94,85	95,17	95,17	95,17	95,17	95,17	
		2. Meningkatkan Mutu dan Distribusi Tenaga	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	100	100	100	100	100	100	

Kesehatan									
	3. Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman	100	100	100	100	100	100	
	4. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase mayarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	100	100	100	100	100	100	
	5. Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	
	6. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Nilai SPIP Dinas Kesehatan	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9	4,0	



		7. Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	70	71	72	73	75	76	
--	--	---	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	--

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupaka prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan. Penahapan Renstra Dinas Kesehatan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Penahapan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
Penguatan Basis Data : Data proyeksi Sasaran dan update data sasaran kelompok penerima layanan Kesehatan, Penguatan Sistem Manajemen pelayanan Kesehatan berbasis digitalisasi berupa RME dan Sisrute	Pembudayaan dan pendampingan perilaku hidup bersih dan sehat di Tingkat keluarga melalui kampanye dan promotive dan preventif	Penguatan layanan Kesehatan dasar melalui peningkatan sarana prasarana dan alat Kesehatan pada fasilitas Kesehatan guna mempermudah jangkauan aksesibilitas oleh Masyarakat	Integrasi layanan Kesehatan digital melalui pengembangan system informasi dan pengembangan inovasi layanan kesehatan	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian atas perencanaan lima tahunan dan penyusunan roadmap keberlanjutan program kesehatan periode berikutnya

**Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029**

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KESEHATAN	KET.
<p>1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat</p>	<p>1. Peningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi gratis serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis,</p> <p>2. Percepatan perluasan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku</p>	<p>1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan makanan tambahan berbahan lokal serta penyediaan layanan cek kesehatan gratis</p> <p>2. Mempercepat pelaksanaan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku hidup sehat.</p> <p>3. Mempercepat</p>	

<p>kehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan</p>	<p>hidup sehat.</p> <p>3. Percepatan penanganan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>4. Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat pravelensi kategori tinggi.</p> <p>5. Peningkatan edukasi kesehatan bagi ibu hamil yang terintegrasi dengan pendampingan pada masa pra dan pasca</p>	<p>penanganan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>4. Mempercepat penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat pravelensi kategori tinggi.</p> <p>5. Meningkatkan edukasi kesehatan bagi ibu hamil yang terintegrasi dengan pendampingan pada masa pra dan pasca persalinan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.</p> <p>6. Memperluas cakupan dan</p>	
--	---	---	--

	<p>ersalinan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.</p> <p>6. Perluasan cakupan dan keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan layanan primer, peningkatan kunjungan kehamilan dan imunisasi, serta mobilisasi kader di tingkat desa.</p> <p>7. Peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan</p>	<p>keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan layanan primer, peningkatan kunjungan kehamilan dan imunisasi, serta mobilisasi kader di tingkat desa.</p> <p>7. Meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine.</p> <p>8. Mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas,</p>	
--	--	---	--

	<p>kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine.</p> <p>8. Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis.</p> <p>9. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan</p>	<p>kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis.</p> <p>9. Memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kepesertaan BPJS secara gratis.</p> <p>10. Memperkaut pelayanan kesehatan melalui penataan tata kelola manajerial, penguatan regulasi internal, dan</p>	
--	---	--	--

	<p>masyarakat melalui kepesertaan BPJS secara gratis.</p> <p>10. Penguatan pelayanan kesehatan melalui penataan tata kelola manajerial, penguatan regulasi internal, dan perbaikan standar operasional di seluruh jenjang fasilitas kesehatan.</p> <p>11. Pemerataan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang</p>	<p>perbaikan standar operasional di seluruh jenjang fasilitas kesehatan.</p> <p>11. Pemerataan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang proporsional serta fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan apotek yang mudah diakses.</p>	
--	--	--	--

	proporsional serta fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan apotek yang mudah diakses.		
--	--	--	--

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

#### 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Kesehatan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, dan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, namun untuk program, kegiatan dan sub kegiatan serta target tahun 2030 merupakan tahun transisi kepemimpinan Kepala Daerah sehingga untuk menjaga kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan nya akan dituangkan dalam renstra ini dan menjadi target kepemimpinan kepala Daerah selanjutnya. Adapun rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan			Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan		
		Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Kesehatan			Nilai Sakip Dinas Kesehatan		
			Persentase Capaian Kinerja Program		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	

				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Jumlah Data Statistik Sektoral daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				<b>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	

				Keuangan SKPD	Keuangan SKPD	Keuangan SKPD	
				Tersedianya Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				<b>Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	

					<b>Perangkat Daerah</b>		
				Terlaksananya Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				<b>Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
				<b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Jumlah	Jumlah Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan	

				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	

				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Jumlah Unit	Jumlah Unit	Pengadaan Peralatan dan	

				Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Tersediaanya Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Pelayanan BLUD</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat			Angka Kematian Ibu (AKI)  Angka Kematian Bayi (AKB)  Prevalensi Stunting  Cakupan kesepertaan jaminan kesehatan  Angka keberhasilan		

					pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)		
				<b>Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	
				<b>Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas	
				Terlaksananya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

					Standar	
				Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas
				Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
				Terlaksananya Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Terlaksananya Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang

				Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Pengembangan Rumah Sakit	
				Terlaksananya Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				<b>Tersedianya Persenyase layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	

					<b>Kabupaten/Kota</b>		
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
				Terlaksananya Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
				Terlaksananya Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
				Terlaksananya Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				Terlaksananya Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
				Terlaksananya Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Sesuai	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	

				Standar	Sesuai Standar		
				Terlaksananya Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
				Terlaksananya Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
				Terlaksananya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
				Terlaksananya Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
				Terlaksananya Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	

				Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan	

				dan Tradisional Lainnya	Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan  Tradisional Lainnya	Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Terlaksananya Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
				Terlaksananya Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Terlaksananya Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	

					Sekolah		
				Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
				Terlaksananya Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional	Operasional Pelayanan Puskesmas	

					Pelayanan Puskesmas		
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian ObatMassal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian ObatMassal)	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
				Terlaksananya Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	

				Terlaksananya Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
				Terlaksananya Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
				Terlaksananya Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
				Terlaksananya Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	

				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				<b>Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				<b>Tersedianya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	

				Terlaksananya Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		<b>Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan</b>		<b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan</b>	<b>Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	
				<b>Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	

				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				<b>Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia</b>	
				Terlaksananya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		<b>Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</b>		<b>Tersedoanya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman</b>	<b>Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	
				<b>Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	

					<b>Tradisional (UMOT)</b>		
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Terlaksananya Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				<b>Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai	

				Industri Rumah Tangga dan Nomor Terlaksananya P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				<b>Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	

					Air Minum (DAM)		
				<b>Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	
				Terlaksananya Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
		<b>Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>		<b>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan</b>	<b>Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	
				<b>Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan,</b>	<b>Persentase Advokasi,</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan,</b>	

				<b>Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				<b>Terlaksananya Sehat Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				<b>Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>	<b>Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	

				<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		
				Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub Kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.1.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/ Program/ Output /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Outcome / Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
<b>Urusan Kesehatan</b>													
Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Nilai SPIP Dinas Kesehatan	3,1	3,2		3,5		3,7		3,9		4		
Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	68,85	71		72		73		75		76		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100	100		100		100		100		100		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	100		100		100		100		100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	134.880.000	2	134.880.000	2	134.880.000	2	134.880.000	2	134.880.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	63.200.000	1	63.200.000	1	63.200.000	1	63.200.000	1	63.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	92.730.320	1	92.730.320	1	92.730.320	1	92.730.320	1	92.730.320	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100.840.000	1	100.840.000	1	100.840.000	1	100.840.000	1	100.840.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	907	1270	91.376.303.398	1270	91.376.303.398	1270	104.979.743.793	1270	106.079.743.793	1270	109.979.743.793	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	983.060.000	12	983.060.000	12	983.060.000	12	983.060.000	12	983.060.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>												
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	90.915.150	1	90.915.150	1	90.915.150	1	90.915.150	1	90.915.150	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	108.293.000	1	108.293.000	1	108.293.000	1	108.293.000	1	108.293.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>												
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan Data Retribusi Daerah	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1		109.940.000		109.940.000		109.940.000		109.940.000		109.940.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.724.100	1	6.724.100	1	6.724.100	1	6.724.100	1	6.724.100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	49.945.880	1	49.945.880	1	49.945.880	1	49.945.880	1	49.945.880	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	54.800.000	1	54.800.000	1	54.800.000	1	54.800.000	1	54.800.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material	1	1	72.000.000	1	72.000.000	1	72.000.000	1	72.000.000	1	72.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu, dan Makan minum pegawai	12	12	35.750.000	12	35.750.000	12	35.750.000	12	35.750.000	12	35.750.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	578.750.000	12	578.750.000	12	578.750.000	12	578.750.000	12	578.750.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	1	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	1	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	366.883.261	0	366.883.261	0	366.883.261	0	366.883.261	0	366.883.261	

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Paket Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	360.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga umum dan Kesehatan Dinkes dan UPT	1	1	7.473.800.000	1	7.473.800.000	1	7.473.800.000	1	7.473.800.000	1	7.473.800.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	27	21.000.000	27	21.000.000	27	21.000.000	27	21.000.000	27	21.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	300.000.000	1	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD</b>												
Pelayanan dan Penunjang Kesehatan yang Melakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	2	13	47.762.247.895	13	47.762.247.895	13	47.762.247.895	13	47.762.247.895	13	47.762.247.895	
<b>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat</b>	<b>Umur Harapan Hidup</b>	68,05	68,73		69,42		70,11		70,8		71,49		
	<b>Angka Kematian Ibu (AKI)</b>	122	109		97		86		77		70		
	<b>Angka Kematian Bayi (AKB)</b>	9,2	7,1		5,6		4,2		3,5		2,1		
	<b>Prevalensi stunting</b>	18,8	17,5		16,3		15,2		14,2		14		
	<b>Cakupan kesepertaan jaminan kesehatan</b>	100	100		100		100		100		100		
	<b>Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)</b>	94,85	95,17		95,17		95,17		95,17		95,17		
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	100	100		100		100		100		100		

MASYARAKAT												
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mmerikan Pelayanan UKM dan UKP di Daerah</b>	100	100		100		100		100		100	
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	0	-	0	-	0	4.500.000.000	1	4.500.000.000	1	4.500.000.000
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	1	7.590.250.000	1	7.590.250.000	1	1.090.250.000	1	1.990.250.000	1	1.090.250.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Pukesmas yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	2	500.000.000	2	500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	2.000.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dilakukan perbaikan	0	2	530.094.140	2	530.094.140	2	1.530.094.140	2	1.351.183.190	2	2.415.386.652
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	1	3.995.000.000	1	3.995.000.000	1	3.995.000.000	1	3.995.000.000	1	3.995.000.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	50		224.874.000		224.874.000		224.874.000		224.874.000		224.874.000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan di Fasilitas Kesehatan	1	1	3.719.619.000	1	3.719.619.000	1	3.719.619.000	1	3.719.619.000	1	3.719.619.000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	12	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.879	1.599	976.409.000	1.599	976.409.000	1.599	976.409.000	1.599	976.409.000	1.599	976.409.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.552	1.428	127.625.000	1.428	127.625.000	1.428	127.625.000	1.428	127.625.000	1.428	127.625.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.550	1.418	284.835.250	1.418	284.835.250	1.418	284.835.250	1.418	284.835.250	1.418	284.835.250	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.968	7.828	469.144.000	7.828	469.144.000	7.828	469.144.000	7.828	469.144.000	7.828	469.144.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.609	18.057	658.982.000	18.057	658.982.000	18.057	658.982.000	18.057	658.982.000	18.057	658.982.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91.938	75.736	49.890.000	75.736	49.890.000	75.736	49.890.000	75.736	49.890.000	75.736	49.890.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.773	19.841	167.728.000	19.841	167.728.000	19.841	167.728.000	19.841	167.728.000	19.841	167.728.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.862	29.519	88.040.000	29.519	88.040.000	29.519	88.040.000	29.519	88.040.000	29.519	88.040.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.919	2.736	112.625.000	2.736	112.625.000	2.736	112.625.000	2.736	112.625.000	2.736	112.625.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	212	206	819.970.000	206	819.970.000	206	819.970.000	206	819.970.000	206	819.970.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	468	3.530	308.243.500	3.530	308.243.500	3.530	308.243.500	3.530	308.243.500	3.530	308.243.500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.440	3.227	80.604.000	3.227	80.604.000	3.227	80.604.000	3.227	80.604.000	3.227	80.604.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	1	89.288.000	1	89.288.000	1	89.288.000	1	89.288.000	1	89.288.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	4.027.746.000	1	4.027.746.000	1	4.027.746.000	1	4.027.746.000	1	4.027.746.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	460.014.000	1	460.014.000	1	460.014.000	1	460.014.000	1	460.014.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	440.162.000	1	440.162.000	1	440.162.000	1	440.162.000	1	440.162.000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	239.526.998	1	239.526.998	1	239.526.998	1	239.526.998	1	239.526.998
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	422.394.000	1	422.394.000	1	422.394.000	1	422.394.000	1	422.394.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1600	1600	201.589.000	1600	201.589.000	1600	201.589.000	1600	201.589.000	1600	201.589.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15	15	25.570.155	15	25.570.155	15	25.570.155	15	25.570.155	15	25.570.155
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	2.423.322.000	1	2.423.322.000	1	2.423.322.000	1	2.423.322.000	1	2.423.322.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1	32.264.000.000	1	32.264.000.000	1	32.264.000.000	1	32.264.000.000	1	32.264.000.000
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	200	200	58.826.000	200	58.826.000	200	58.826.000	200	58.826.000	200	58.826.000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
Penyelenggaraan Kabupaten/KotaSehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	91.278.000	1	91.278.000	1	91.278.000	1	91.278.000	1	91.278.000
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	1	975.000.000	1	975.000.000	1	975.000.000	1	975.000.000	1	975.000.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	12	2.823.093.000	12	2.823.093.000	12	2.823.093.000	12	2.823.093.000	12	2.823.093.000

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	836.154.000	1	836.154.000	1	836.154.000	1	836.154.000	1	836.154.000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12	12	-	12	-	12	600.000.000	12	200.000.000	13	-	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian ObatMassal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	1	23.388.000	1	23.388.000	1	23.388.000	1	23.388.000	1	23.388.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120	120	30.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2	2	43.030.000	2	43.030.000	2	43.030.000	2	43.030.000	2	43.030.000	
Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7	7	11.550.000	7	11.550.000	7	11.550.000	7	11.550.000	7	11.550.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	265.170.000	1	265.170.000	1	265.170.000	1	265.170.000	1	265.170.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1	1	198.956.581	1	198.956.581	1	198.956.581	1	198.956.581	1	198.956.581	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	419.457.500	1	419.457.500	1	419.457.500	1	419.457.500	1	419.457.500	
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1	1	718.400.000	1	718.400.000	1	718.400.000	1	718.400.000	1	718.400.000	
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan layanan imunisasi	1	1	705.505.000	1	705.505.000	1	705.505.000	1	705.505.000	1	705.505.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Menyelenggarakan Sistem Informasi terintegrasi</b>												
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	33.374.000	1	33.374.000	1	33.374.000	1	33.374.000	1	33.374.000	
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang beroperasi dan memiliki izin</b>												

Daerah Kabupaten/Kota													
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</b>												
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di FKTP</b>												
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	1	1.920.944.000	1	1.920.944.000	1	1.920.944.000	1	1.920.944.000	1	1.920.944.000	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</b>												
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1	1	1.080.305.000	1	1.080.305.000	1	1.080.305.000	1	1.080.305.000	1	1.080.305.000	
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Sediaan Farmasi, alkes dan makanan minuman</b>												
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>												

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase Capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>												
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>												
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>												
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30	30	106.560.500	30	106.560.500	30	106.560.500	30	106.560.500	30	106.560.500	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG</b>	<b>Persentase Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan</b>												

KESEHATAN													
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	22.006.000	1	22.006.000	1	22.006.000	1	22.006.000	1	22.006.000	
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	1	90.650.000	1	90.650.000	1	90.650.000	1	90.650.000	1	90.650.000	
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	162.880.000	1	162.880.000	1	162.880.000	1	162.880.000	1	162.880.000	
<b>Jumlah</b>				<b>228.286.135.628</b>		<b>228.286.135.628</b>		<b>240.489.576.023</b>		<b>241.910.665.073</b>		<b>246.274.868.535</b>	

### 4.1.3 Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.3. Daftar Program Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	Pemberian Minum Susu Gratis	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	<b>Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			<b>Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh</b>	

			<p><b>Industri Rumah Tangga</b></p> <p>Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri RumahTangga</p>	
			<p><b>Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b></p>	
			<p>Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanPenerbitan Sertifikat Laik HigieneSanitasi Tempat PengelolaanMakanan (TPM) antara lain JasaBoga, Rumah Makan/Restoran danDepot Air Minum (DAM)</p>	
			<p><b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b></p>	
			<p>Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</p>	
2	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	<p><b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	

			Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas	
			Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	
			Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Pengelolaan	

			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
		Meningkatnya mutu	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan</b>	

		dan distribusi tenaga kesehatan	<b>Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota /</b>	
			Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	<b>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			<b>Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
3	Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua	Meningkatnya kualitas	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk</b>	

		kehatan perorangan dan masyarakat	<b>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan

### 4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Melalui Indiator Kinerja Utama (IKU)

IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah merupakan Indikator ukuran keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan antara lain :

Tabel 4.2.1.1. Indikator Kinerja Utama Dinas kesehatan Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	20230	
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	122	109	97	86	77	70	
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 Kh	9,2	7,2	5,6	4,2	3,5	2,1	
3	Prevalensi stunting	Persentase	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14	

### 4.2.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indiator Kinerja Kunci (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Kabupaten Barito Selatan dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Dinas kesehatan Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	122	109	97	86	77	70	
2	Prevalensi stunting	Persentase	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14	
3	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	

Indikator Lainnya dibidang kesehatan yang juga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan kesehatan dasar yaitu Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2.2.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas kesehatan Tahun 2025-2030

No	Indikator SPM	Target (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100

Indikator lain yang juga terdapat pada RPJMN yaitu RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) sebagai berikut :

Tabel 4.2.2.3. Indikator RIBK Dinas kesehatan Tahun 2025-2030

No	Indikator RIBK	Target (%)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Prevalensi Depresi pada usia $\geq$ 15 tahun	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
2.	Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	1	1	1	1	1
3.	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
4.	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	20	35	55	65	75
5.	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	70	75	77	78	80
6.	Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	60	65	70	75	80
7.	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	20	40	60	80	100

8.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	50	50	50	70	80
9.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	65	70	75	80	90
10.	Persentase lanjut usia yang mandiri	75	77	79	81	83
11.	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	12	11,5	10,5	9	8,4
12.	Cakupan penemuan kasus TB	90	90	90	90	90
13.	Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta	1	1	1	1	1
14.	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	20	35	55	65	75
15.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	33,3	41,6	58,33	66,67	75
16.	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	33,3	41,6	58,33	66,67	75
17.	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	1	1	1	1	1
18.	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100	100	100	100	100
19.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025-2029 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2045. Renstra Dinas Kesehatan mendukung misi nomor 1 (satu) pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yaitu “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil”. Adapun tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ialah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, UPT RSUD, UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang pada Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 tetap berpedoman kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dan mendahulukan prinsip asas kebermanfaatan di bidang kesehatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah. Dalam hal pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keberhasilan selama 5 (lima) tahun dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan input, output maupun impact secara rutin triwulanan dan tahunan di internal Dinas Kesehatan maupun lintas sektor terkait.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

**“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”.**

Buntok, 2025

Pt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Barito Selatan



**dr. DADANG BASKORO NUGROHO, Sp.PD**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19720209 200212 1 001